

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi dalam menyalurkan informasi keuangan melalui situs resmi telah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Hal ini termuat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi turut ditegaskan melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggungjawab atas setiap informasi publik.

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah, terkait penyampaian informasi kepada publik, pemerintah daerah seharusnya telah menggunakan internet sebagai media untuk menyampaikan laporan keuangan (*Internet Financial Reporting*) kepada masyarakat.

Di era demokrasi ini, masyarakat memegang peran penting dalam mengawasi keberlangsungan pemerintahan di daerah. Pemilih (*voters*) yaitu masyarakat memegang peran penting atas terpilihnya pejabat terpilih (walikota/bupati). Monir dkk. (2014) menyatakan bahwa pemilih dapat mempengaruhi hasil pemilu, kelompok kepentingan memiliki insentif untuk mencari informasi tentang tindakan agen

politik. Jika pengusaha politik ingin terpilih, mereka tidak bisa mengabaikan kepentingan kelompok tersebut (Monir dkk. 2014). Berdasarkan hal tersebut, kepala daerah harus melakukan pertanggungjawaban serta transparansi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Martani (2014) merumuskan bahwa transparansi diperlukan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara objektif. Pemerintah daerah yang menjalankan asas transparansi dapat dilihat dari ketersediaan informasi keuangan secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat luas dan pihak lain yang berkepentingan.

Bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu melakukan pelaporan keuangan melalui *website*. Bertot dkk. (2010) menyatakan kesempatan untuk mengakses informasi tentang pemerintah daerah, seperti yang dapat dilakukan dalam pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet, sekarang ini perlu diperhatikan untuk menjamin partisipasi demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah, mencegah korupsi, menginformasikan keputusan, akurasi informasi pemerintah, ketersediaan informasi bagi publik, perusahaan, dan jurnalis.

Dalam hal pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, situs internet pemerintah di banyak negara telah menjadi instrumen layanan potensial yang inovatif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi online melalui internet secara umum telah berdampak besar pada aktivitas manusia. Berkomunikasi melalui internet telah memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses suatu informasi kapanpun dan

dimanapun. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian untuk pengembangannya oleh pemerintah Indonesia, terlebih pengguna internet Indonesia diperkirakan akan mencapai 112 juta orang di tahun 2017 atau naik ke peringkat 5 dunia dari peringkat 6 saat ini (Yusuf, 2014).

Pelaporan keuangan melalui website juga dilakukan sebagai salah satu upaya menjalankan asas akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan penerapan *e – Government* sudah tertuang dalam bentuk Intruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah baik dari pusat hingga daerah membangun situs web nya masing-masing dalam upaya untuk memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat hingga akhirnya mampu menjadi *good governance*. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela dan konkrit dalam mewujudkan akuntabilitasnya (Febrianty dan Jatmiko, 2011). Dengan demikian pola layanan informasi publik tradisional dengan layanan *face to face* dapat dikembangkan menjadi model baru melalui *e- Government* yang lebih efisien dan fleksibel karena pengaksesannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat.

Publikasi laporan keuangan pemerintah melalui *e-Government* yang dikenal dengan *internet financial reporting (IFR)* merupakan salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi. Oleh karena ini, Trisnawati dan Achmad (2014) menemukan bahwa tidak semua Pemda mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar Pemda.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet, di tahun 2012 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut mewajibkan agar Pemda mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya. Akan tetapi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada September 2013 diungkapkan bahwa ternyata mayoritas Pemda masih enggan mempublikasikan pengelolaan anggaran pada situs resminya. Agustin (2014) telah melakukan penelitian serupa untuk membuktikan publikasi pengelolaan anggaran pada website Pemda di Sumatera Barat namun hasilnya masih banyak Pemda yang masih kurang dalam mewujudkan transparansi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pengungkapan IFR pada website pemerintah.

.Penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) membuktikan bahwa kompetisi tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan hasil penelitian Rahman dkk. (2013) membuktikan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil penelitian Rahman dkk.(2013) menunjukkan bahwa kekayaan pemda berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkan bahwa kekayaan pemda tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil penelitian Medina (2012) menunjukkan bahwa Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkan bahwa Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil penelitian Rahman (2013) menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil penelitian Wanda (2015) menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan Arief dkk (2016) menunjukkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Hasil penelitian Rosita (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*. Sedangkan Rahmad (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan sampel di Indonesia Tahun 2014. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan sampel khususnya di Sumatera Tengah pada Tahun 2016.

Oleh karena itu, dikarenakan belum konsistennya hasil penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ariefa dan Yaya (2016), Rosita (2016), dan Rahmad (2013).

1.2 Rumusan Masalah

- a) Apakah *politic competition* berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?
- b) Apakah kekayaan pmda berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?
- c) Apakah ukuran pmda berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?
- d) Apakah tipe pmda berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?
- e) Apakah opini audit berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?
- f) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *internet financial reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaruh *politic competition* terhadap *internet financial reporting*.
- b) Untuk mengetahui pengaruh kekayaan pmda terhadap *internet financial reporting*.

- c) Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemda terhadap *internet financial reporting*.
- d) Untuk mengetahui pengaruh tipe pemda terhadap *internet financial reporting*.
- e) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *internet financial reporting*
- f) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *internet financial reporting*

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan, pengetahuan, menambah pengalaman dan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat terhadap pelaporan keuangan internet pada pemerintah daerah khususnya di Sumatera Tengah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisannya.

Bab kedua berisi tentang tujuan tinjauan pustaka, menguraikan teori yang digunakan, sumber yang digunakan, landasan teori yang dipakai, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi definisi variabel, pengukuran yang digunakan, populasi, penentuan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan dan metode analitis.